



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PEMALANG**

**2024**



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**KECAMATAN ULUJAMI**

**TAHUN 2024**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ulujami, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024.



2023

CAMAT ULUJAMI

Drs. **JOKO SUTRISNO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 196610081986031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang telah Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini disamping sebagai dokumen rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Ulujami sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulujami.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja PD ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Ulujami 2023  
Pemerintah Kabupaten Pemalang  
CAMAT ULUJAMI  
KECAMATAN  
ULUJAMI  
  
Drs. **JOKO SUTRISNO, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661008 198603 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMTAN ULUJAMI TAHUN 2022 .....</b>	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2022 Capaian Renstra Kecamatan Ulujami .....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami .....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ulujami.....	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaah Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat ...	38
<b>BAB III HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMTAN ULUJAMI TAHUN 2022 .....</b>	<b>40</b>
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ulujami.....	41
A. Tujuan .....	41
B. Sasaran.....	41
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	42
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMTAN ULUJAMI.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian .....	57
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Tujuan.....	57
5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	57
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecaatan Ulujami dan Pencapaian Restra Kecamatan Ulujami s/d Tahun 2023 Kabupaten Pemalang .....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami.....	22
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024.....	32
Tabel 2.4 Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 .....	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulujami Tahun 2024.....	42
Tabel 4.1 Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ulujami Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2024 .....	3
Gambar 1.2 : Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR .... TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ulujami yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Renja Kecamatan Ulujami merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Ulujami yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Ulujami melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024. Renja Kecamatan Ulujami dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Ulujami mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Ulujami mengingat :



1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Ulujami dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Ulujami untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

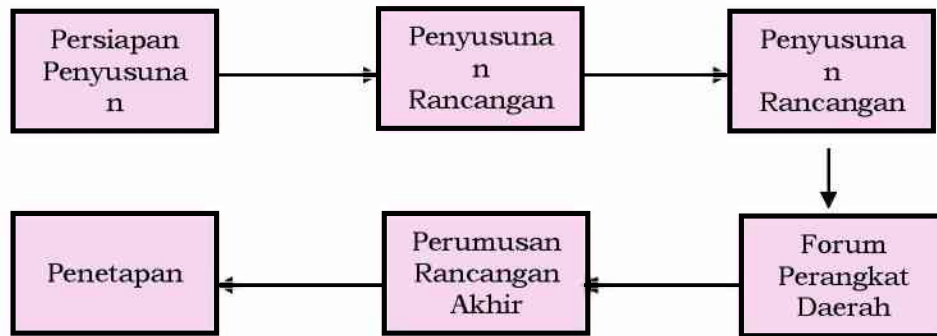
1. Persiapan penyusunan
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024
  - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2021, pengendalian kegiatan tahun 2022, dan RKPD tahun 2024)
2. Penyusunan rancangan awal
  - Koordinasi dengan Seksi-seksi
  - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
  - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024
  - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Ulujami
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
  - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024
  - Diverifikasi oleh Bappeda



## 6. Penetapan

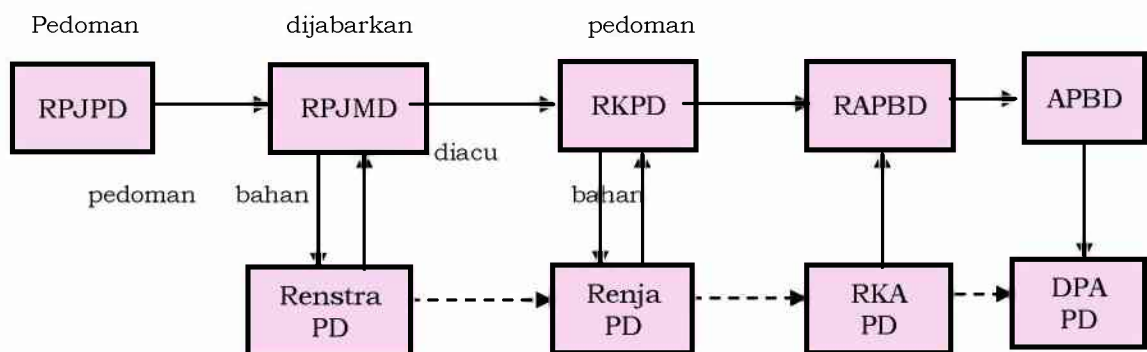
- Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1  
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Ulujami  
Tahun 2024



Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Ulujami tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2024 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2  
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Kecamatan Ulujami berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

- Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
  34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
  35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
  36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
  37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

38. Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang;
39. Peraturan Bupati Pematang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
40. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pematang;
41. Peraturan Bupati Pematang Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Ulujami adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2024 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Ulujami tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Ulujami sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Ulujami;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Ulujami tahun 2024;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2022, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022 mengacu pada APBD Tahun 2022 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Ulujami, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan Ulujami, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulujami, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ulujami, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ulujami, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Ulujami**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Ulujami pada tahun 2022 dan estimasi tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

##### Tahun Anggaran 2022

Jumlah anggaran Kecamatan Ulujami sebesar **Rp 3.436.025.000,-** yang terbagi dalam **6** program, **16** kegiatan dan **57** sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar **Rp 3.108.079.492,-** atau sebesar 90,46%.

##### Tahun Anggaran 2023 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan sebesar **2.840.126.600,-** yang terbagi dalam **6** program, **15** kegiatan dan **53** sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II anggaran yang sudah terealisasi sebesar **Rp. 1.530.592.890,** atau sebesar 51,22 %.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2022, Kecamatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan dengan adanya pandemi Covid 19 membatasi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan juga membatasi rapat koordinasi ke luar daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2022, Kecamatan Ulujami telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada **6** Program, **16** Kegiatan dan **57** Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Semua Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tidak melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah Besarnya dana yang tersedia tidal bisa mencukupi keseluruhan pelaksanaan kegiatan (Plafon kegiatan masih ditentukan dari tingkat Kabupaten)
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Ulujami yaitu tercapai di tahun 2022;
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan Rapat kerja Penyusunan anggaran dan fisik .
  - b. Dilaksanakan evaluasi capaian anggaran dan fisik .

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 Kabupaten Pemalang sebagai berikut

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ulujami s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Pemalang**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4*100%)
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek	46,18	45,2	45,2	40,66	89,96	46,08	43,37	93,91
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	35,53	35,37	35,37	<b>33,86</b>	95,73	35,4	<b>48,1</b>	135,37
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	45	15	15	15	100	15	45	100
		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	9	3	3	3	100	3	9	100
		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	12	4	4	4	100	4	12	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	4	4	4	100	4	12	100
		<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
		<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Laporan</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	Orang/ bulan	17/42	22/14	17/14	17/14	100	17/14	17/42	100
		<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Orang/ bulan</b>	<b>17/42</b>	<b>16/14</b>	<b>17/14</b>	<b>17/14</b>	<b>100</b>	<b>17/14</b>	<b>17/42</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	<b>Dokumen</b>	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun	<b>Dokumen</b>	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Dokumen)	<b>Dokumen</b>	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Dokumen)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluaran	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	398	0	2	2	100	396	398	100
		<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Layanan</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>252</b>	<b>100</b>
	Hasil	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	Dokumen	2	0	1	1	100	1	2	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	Laporan	2	0	1	1	100	1	2	100
		<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	2	0	2	1	100	1	2	100
		<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas</b>	<b>orang</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>100</b>	<b>147</b>	<b>477</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/ keg.	741	308	308	308	100	125	741	100
		<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>orang/ keg.</b>	<b>741</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>741</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi Peraturan perundang undangan	orang/ keg.	66	22	22	22	100	22	66	100
		<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>orang/ keg.</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>66</b>	<b>100</b>
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	12	4	4	4	100	4	12	100
		<b>Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>165809</b>	<b>55270</b>	<b>55269</b>	<b>55269</b>	<b>100</b>	<b>55270</b>	<b>165809</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil</b>	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis/bulan)	Jenis/ bulan	30/36	10/12	3/12	3/12	100	4/12	4/36	100
		<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (unit)	Unit	12	4	4	4	100	4	12	100
		<b>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan (jenis/bulan)	Jenis / Bln	12/12	4/12	4/12	4/12	100	4/12	12/12	100
		<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Jenis / Bln	6/12	2/12	2/12	2/12	100	2/12	6/12	100
		Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	30000	10000	10000	10000	100	10000	30000	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang disediakan (jenis/bulan)	Jenis / Bln	15	5	5	5	100	5	15	100
		<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kegiatan	180	108	36	36	100	36	180	100
		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>180</b>	<b>108</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>180</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	Jenis / Bln	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>Paket</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	10	0	6	6	100	4	10	100
		<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	10	0	6	6	100	4	10	100
		<b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	12	4	4	4	100	4	12	100
		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun</b>	<b>Laporan</b>	<b>108</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	Surat	3600	1.200	1.200	1.200	100	1.200	3600	100
		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Laporan</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar (rekening/bulan)	Jenis/ bulan	3/36	3/12	3/12	3/12	100	3/12	3/36	100
		<b>Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar (rekening/bulan)</b>	<b>Laporan</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar (orang / bulan)	Orang/ bulan	9/36	9/12	9/12	9/12	100	10/12	10/36	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Jumlah tenaga non ASN yang dibayar (orang/bulan)</b>	<b>Laporan</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	297	99	99	99	100	99	297	100
		<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>297</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>297</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil</b>	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berijin dan terpelihara	Unit	42	14	14	14	100	14	42	100
		<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b>	<b>Unit</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah meubel yang terpelihara	Unit	105	35	35	35	100	35	105	100
		<b>jumlah meubel yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>105</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Unit	129	43	43	43	100	43	129	100
		<b>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)</b>	<b>Unit</b>	<b>129</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>43</b>	<b>129</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	Unit	12	4	4	4	100	4	12	100
		<b>Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)</b>	<b>Unit</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	Unit	9	3	3	3	100	3	9	100
		<b>Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab /dipelihara (unit)</b>	<b>Unit</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
7.01.02	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%	279,99	93,33	93,33	93,33	100,00	93,33	279,99	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Data	36	12	12	12	100	12	36	100
		<b>Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	290	95	100	100	100	95	290	100
		<b>Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>290</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>290</b>	<b>100</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang temutakhirkan	Dokumen	36	12	12	12	100	12	36	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>										
	<b>Keluaran</b>	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	<b>387</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>129</b>	<b>387</b>	<b>100</b>
		<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>387</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>129</b>	<b>387</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil</b>	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah SOP peanaan yang tersusun	Dokumen	9	3	3	3	100	3	9	100
		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	Layanan	18	6	6	6	100	6	18	100
		<b>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</b>	<b>Laporan</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>100</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	Kasus	360	120	120	120	100	120	360	100
		<b>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>Laporan</b>	<b>360</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>360</b>	<b>100</b>
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>										
	<b>Keluaran</b>	Jumlah pelayanan berdasar limpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kewenangan	8031	2.677	2.677	2.677	100	2.677	8031	100
		<b>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8017</b>	<b>2.659</b>	<b>2.679</b>	<b>2.679</b>	<b>100</b>	<b>2.679</b>	<b>8017</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil</b>	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah izin non usaha yang diterbitkan	Izin	7.920	2.640	2.640	2.640	100	2.640	7920	100
		<b>jumlah izin non usaha yang diterbitkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7.920</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>100</b>	<b>2.640</b>	<b>7920</b>	<b>100</b>
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	Dokumen	54	18	18	18	100	18	54	100
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	Surat	40	0	20	20	100	20	40	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan</b>	<b>Laporan</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan yang tersedia	Dokumen	57	19	19	19	100	19	57	100
		<b>Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan yang tersedia</b>	<b>Dokumen</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>100</b>
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	300	100	100	100	100,00	100	300	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan	Orang	741	247	247	247	100	247	741	100
		<b>Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>73</b>	<b>100</b>
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran musyawarah pembangunan (Desa/Kel+Kec)	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Orang	276	92	92	92	100	92	276	100
		<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	<b>Lembaga kemasyarakatan</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orang	450	150	150	150	100	150	450	100
		<b>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang kab yang didampingi	Desa/ kelurahan	36	12	12	12	100	12	36	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Lembaga	15	5	5	5	100	5	15	100
		<b>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>Laporan</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
<b>07.01.04</b>	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	300	100	100	100	100,00	100	300	100,00
<b>7.01.04.2.01</b>	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang	108	36	36	36	100	36	108	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang	108	36	36	36	100	36	108	100
		<b>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	Peraturan	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil</b>	Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbub yang dimonitoring	Peraturan	3	1	1	1	100	1	3	100
		<b>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>07.01.05</b>	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	300	100	100	100	100,00	100	300	100,00
<b>7.01.05.2.01</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang	278	92	93	93	100	93	278	100
		<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>360</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>360</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun</b>	%	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Pemalang, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	Dokumen	8	2	3	3	100	3	8	100
		<b>Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Pemalang, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun</b>	<b>Orang</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	Orang	54	18	18	18	100	18	54	100
		<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>	<b>Orang</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>100</b>
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial desa dan Kecamatan	Laporan	180	60	60	60	100	60	180	100
		<b>Jumlah potensi konflik sosial desa dan Kecamatan</b>	<b>Kaus</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>100</b>
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompincam	Tema	36	12	12	12	100	12	36	100
		<b>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
<b>07.01.06</b>	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	233,33	73,33	80	80	100,00	80	233,33	100,00
<b>7.01.06.2.01</b>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa	777	254	255	255	100	268	777	100
		<b>Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>777</b>	<b>254</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>100</b>	<b>268</b>	<b>777</b>	<b>100</b>
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		<b>Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun</b>	%	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	Desa/ kegiatan	12	4	4	4	100	4	12	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Desa/ kegiatan	162	54	54	54	100	54	162	100
		<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa/ kegiatan	162	54	54	54	100	54	162	100
		<b>Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas kepala desa dan Perangkat desa	Desa/ kegiatan	18	6	6	6	100	6	18	100
		<b>Jumlah peserta pembinaan uraian tugas kepala desa dan Perangkat desa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Desa	1	0	1	1	100	0	1	100
		<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Orang/ kegiatan	108	36	36	36	100	36	108	100
		<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>108</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	Surat	30	10	10	10	100	10	30	100
		<b>Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan desa (RPJMDes dan RKP Des)	Desa/ kegiatan	162	54	54	54	100	54	162	100
		<b>Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan desa (RPJMDes dan RKP Des)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi masyarakat desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Desa/ kegiatan	54	18	18	18	100	18	54	100
		<b>Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi masyarakat desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>100</b>
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan desa	Orang/ kegiatan	26	4	4	4	100	18	26	100
		<b>Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan desa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>100</b>



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami Tahun 2022 dan 2023 serta proyeksi Tahun 2024 dan 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Rencana Pembangunan Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		86,18	86,23	86,26		<b>88,74</b>		86,26		
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		86,32	86,32	87,93		<b>89,25</b>		89,30		
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				45,08	46,12	46,16		<b>45,08</b>		46,18		
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai				35,40	35,44	35,47		<b>48,10</b>		35,47		
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%				86,60	86,60	86,60		86,60		86,60		
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				78,33	78,33	80,25		78,33		80,25		
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100		100		100		
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100		100		100		
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				66,67	66,67	72,22		66,67		72,22		

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ulujami

Kecamatan Ulujami adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Ulujami berdasarkan Renstra tahun 2022-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Cakupan layanan kecamatan
- c. Nilai SAKIP
- d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
- f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
- g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
- h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
- i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2022 IKM Kecamatan Ulujami sebesar **87,74** dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Ulujami. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujami meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2022, cakupan layanan Kecamatan Ulujami tersebut mencapai 100 % dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Ulujami meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100 % melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 6 kewenangan dari total 6 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 100 %, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.



Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100 % karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/ kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa pada perencanaan pembangunan sudah 100 %, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Ulujami. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 100% yaitu sebanyak 0 desa dari 18. desa di Kecamatan Ulujami. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Ulujami.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2022, Kecamatan Ulujami mendapat nilai SAKIP sebesar **33,86** (kategori C) dan IRB sebesar **40,66** (kategori C) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Ulujami untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Ulujami perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Ulujami untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2022-2026. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Ulujami yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia;
- b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan;
- c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa / kelurahan dan kecamatan;
- d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa dan kecamatan;

- e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik;
- f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja;
- g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Ulujami juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
- d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
- e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
- f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
- g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Ulujami justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Adil**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua

masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

### **Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

### **Agamis**

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

### **Ngangeni**

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. “Pemalang itu ngangeni”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
- d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
- f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

a. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

b. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

c. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Ulujami mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Ulujami mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 adalah **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata,**

**didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**”, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2024, diarahkan pada **“Peningkatan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Pembangunan Produktifitas ekonomi yang berkualitas;
- b. Fasilitasi Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Desa Sinergi;
- c. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dalam penataan kota;
- d. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;
- e. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak covid;

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami tahun 2023, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Ulujami mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Ulujami adalah :

1. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.



2. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Ulujami.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujami ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjangkaran masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Ulujami dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.



## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Ulujami. Renja Kecamatan Ulujami disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Ulujami dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Method* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Material* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pematang Hari Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Ulujami.

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>				<b>2.270.759.350</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>				<b>2.270.759.350</b>	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	2.054.859.850	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	2.054.859.850	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	17/14 Orang/bulan	2.054.859.850	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	17/14 Orang/bulan	2.054.859.850	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	38.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	38.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.899.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.899.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	177.899.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	177.899.500	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>24.993.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>24.993.000</b>	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	1.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	1.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				11.993.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				11.993.000	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	1 Dokumen	1.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	1 Dokumen	1.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.993.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.993.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	600 Dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	600 Dokumen	5.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19 Laporan	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19 Laporan	2.000.000	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>35.998.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>35.998.000</b>	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				30.998.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				30.998.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	28.998.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	28.998.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Ulujami	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Ulujami	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>6.000.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>6.000.000</b>	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	1 Laporan	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kec. Ulujami	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	1 Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		<i>Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.000.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1 Laporan	1.000.000	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>53.658.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>53.658.000</b>	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				53.658.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				53.658.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	225 Orang	47.158.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	225 Orang	47.158.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	18 Orang	1.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	18 Orang	1.000.000	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	1 Laporan	1.000.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	1 Laporan	1.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	4.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	4.500.000	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		-	-	<b>31.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		-	-	<b>31.000.000</b>	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan				31.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan				31.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengawasan Pemerintahan Desa					Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	1.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	1.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	18 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	18 Dokumen	3.000.000	
		Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	5.000.000		Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	5.000.000	
	<b>NON URUSAN</b>				<b>417.718.250</b>	<b>NON URUSAN</b>				<b>417.718.250</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>				<b>417.718.250</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>				<b>417.718.250</b>	
7	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>				<b>417.718.250</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>				<b>417.718.250</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			<i>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					<i>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	8.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	2 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	2 Laporan	2.500.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	1.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	1.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	1.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-</i>	308 Orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-</i>	308 Orang	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			<i>Undangan</i>					<i>Undangan</i>			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	20 Orang	1.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	20 Orang	1.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				107.268.348	Administrasi Umum Perangkat Daerah				107.268.348	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	79.351.848	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	79.351.848	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	4.416.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	4.416.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan	15.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	3 Dokumen	1.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	3 Dokumen	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162.966.822	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162.966.822	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	600 Laporan	15.010.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	600 Laporan	15.010.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan	50.756.822	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan	50.756.822	
		Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	97.200.000		Kec. Ulujami	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	97.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.483.080	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.483.080	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	14 Unit	100.548.080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	14 Unit	100.548.080	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	35 Unit	1.935.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	35 Unit	1.935.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	43 Unit	7.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ulujami	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	43 Unit	7.000.000	



## 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2024 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4

Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2024

### 1. Pembangunan Fisik

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator, Kinerja	Volume (Meter)	Besaran (Rp.)	Catatan (Ranking)
1	2	3	4	5	6	7
1	Senderan Irigasi	Desa Bumirejo	Senderan Irigasi RT. 01,06,07 RW. 03	300 x 3	192.000.000	1
2	Jalan antar desa	Desa Padek	Jalan antar desa Padek - Mojo dan taludnya	300 x 3 0,15	181.808.000	2
3	Meningkatan jalan rabat beton	Desa Wiyorowetan	Meningkatan jalan rabat beton Jl. Semangka, RT.04/01 (Kawasan Wiyorowetan - Bumirejo)	470 x 3,20	215.600.000	3
4	Talud pengerasan jalan, rabat beton	Desa Rowosari	Talud pengerasan jalan, rabat beton	228 x 0,4 x 0,8	188.419.200	4
5	Pembangunan talud bahu jalan, pelebaran, pengurukan, dan peningkatan jalan desa	Desa Botekan	Pembangunan talud bahu jalan, pelebaran, pengurukan, dan peningkatan jalan desa Botekan,	230 x 0,4 x 0,8	190.072.000	5

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator, Kinerja	Volume (Meter)	Besaran (Rp.)	Catatan (Ranking)
1	2	3	4	5	6	7
			Sukorejo Kec. Ulujami, menuju Sikayu- Sidorejo Kec. Comal			
6	Jalan rabat beton usaha tani dan talud jalan	Desa Sukorejo	Jalan rabat beton usaha tani dan talud jalan di RT. 04/ 09 menghubungkan dengan Desa Mejasem	200 x 1 x 0,40	82.841.175	6
7	Pembangunan Rabat Beton	Desa Tasikrejo	Pembangunan Rabat Beton Jl. Gotong Royong (Tasikrejo - Kaliprau RT. 03/04	2,5 x 0,15 x 1500	85.903.125	7
8	Rabat beton Jalan Penghubung Desa	Desa Mojo	Rabat beton Jalan Penghubung Desa Mojo - Pesantren	250 x 3 x 0,15	84.892.500	8
9	Rabat beton	Desa Kertosari	Rabat beton Jl. Widoro Kertosari - Kaliprau	450 x 2,5 x 0.15	80.850.000	9
10	Pelatihan Bengkel Mobil	Desa Kaliprau	Terlaksananya Pelatihan Bengkel Mobil	16 orang	55.000.000	1
11	Pelatihan Sepakbola	Desa Samong	Terlaksananya Pelatihan Sepakbola	25 orang	30.000.000	2
12	Pelatihan Pembuatan Pelet Ikan	Desa Tasikrejo	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pelet Ikan	20 orang	30.000.000	3
			JUMLAH		1.043.578.000	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ULUJAMI**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2024 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, dengan prioritas pembangunan 2024 pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada “**Peningkatan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata**” dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan Produktifitas ekonomi yang berkualitas;
2. Fasilitasi Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Desa Sinergi;
3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dalam penataan kota;
4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;

5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak covid;

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ulujami**

Kecamatan Ulujami dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Ulujami harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Ulujami secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

#### **A. Tujuan**

Tujuan Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024 adalah “**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulujami sebagai Peangkat Daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

#### **B. Sasaran**

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Ulujami dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Ulujami tahun 2024, adalah “**Meningkatnya pelayanan kecamatan**”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat

diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.;

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulujami Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86,23
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	89,45

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, Kecamatan Ulujami merencanakan sebanyak 6 program, 15 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Ulujami dengan kebutuhan dana sebesar **Rp. 2.840.126.600,-** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ULUJAMI**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2024. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
    - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
    - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
    - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- d. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

**Tabel 4.1**  
**Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ulujami Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
<b>07.01</b>	<b>KECAMATAN ADMINISTRASI</b>								<b>2.840.116.600</b>					<b>3.308.606.602</b>
<b>07.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								<b>2.688.477.600</b>					<b>3.152.948.602</b>
<b>07.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>23.000.000</b>					<b>28.000.000</b>
07.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Kecamatan Ulujami	36,30 skor	3 Dokumen	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	3.000.000,00
07.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan	Kecamatan Ulujami	36,30 skor	1 Dokumen	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	2.500.000,00
07.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan	Kecamatan Ulujami	36,30 skor	1 Dokumen	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	2.500.000,00
07.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan	Kecamatan Ulujami	36,30 skor	1 Dokumen	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	2.500.000,00
07.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kecamatan Ulujami	36,30 skor	1 Dokumen	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	36,80 skor	2.500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(SAKIP)	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan						Umum		(SAKIP)		
07.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan	Kecamatan Ulujami	36,30 skor	4 Laporan	100%	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	9.000.000,00
07.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan	Kecamatan Ulujami	36,30 skor	4 Laporan	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	6.000.000,00
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>2.061.859.850</b>					<b>2.509.699.000</b>
7.01.01.2.02.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kecamatan Ulujami	36,30 Skor	17 Orang/ 14 Bulan	100%	2.054.859.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	2.501.699.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kecamatan Ulujami	36,30 Skor	1 Laporan	100%	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	3.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kecamatan Ulujami	36,30 Skor	2 Laporan	100%	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	3.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kecamatan Ulujami	36,30 Skor	1 Dokumen	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	2.000.000,00
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>								<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Kecamatan Ulujami	36,30 Skor	1 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	1.000.000
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Kecamatan Ulujami	36,30 Skor	2 Laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	36,80 skor	1.000.000
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>6.000.000</b>					<b>6.000.000</b>
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	IRB	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	308 Orang	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	5.000.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IRB	Jumlah orang yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undang	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	20 Orang	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	1.000.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>107.268.348</b>					<b>243.500.002</b>
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IRB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	10 Paket	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IRB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	3 Paket	100%	79.351.848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	80.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IRB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	12 Paket	100%	4.416.500	Dana Transfer Umum-Dana		IRB	37,32 Skor	5.000.000,00



Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				yang memperlancar pelaksanaan tugas						Alokasi Umum				
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IRB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	3 Dokumen	100%	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	2.500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IRB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	2 Laporan	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	150.000.002,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	IRB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	3 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	1.000.000,00
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>38.000.000</b>					<b>30.000.000</b>
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	IRB	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	1 Unit	100%	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	30.000.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>162.966.822</b>					<b>151.053.600</b>
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 skor	600 Laporan	100%	15.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	15.500.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 skor	3 Laporan	100%	50.756.822	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	45.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 skor	12 Laporan	100%	97.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	90.553.600,00

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								<b>287.382.580</b>				<b>182.696.000</b>	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IRB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	14 Unit	100%	100.548.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	100.500.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	IRB	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	35 Unit	100%	1.935.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	2.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IRB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	43 unit	100%	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	10.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IRB	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	Kecamatan Ulujami	36,82 Skor	2 Unit	100%	177.899.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IRB	37,32 Skor	70.196.000,00
<b>07.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>24.993.000</b>				<b>29.000.000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>1.000.000</b>				<b>1.000.000</b>	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi	Kecamatan Ulujami	93,33%	1 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	1.000.000
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								<b>11.993.000</b>				<b>13.000.000</b>	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan	Kecamatan Ulujami	93,33%	2 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	1.000.000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan	Kecamatan Ulujami	93,33%	2 Laporan	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	6.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Persentase pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan	Persentase dokumen	Kecamatan Ulujami	93,33%	4 Laporan	100%	5.993.000	Dana Transfer		Persentase pelayanan	93,33 %	6.000.000

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	publik yang tersedia	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	pelayanan kepada masyarakat terselesaikan						Umum-Dana Alokasi Umum		publik yang tersedia		
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>								<b>12.000.000</b>					<b>15.000.000</b>
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kecamatan Ulujami	93,33%	600 Dokumen	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	6.000.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kecamatan Ulujami	93,33%	1 Laporan	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	6.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kecamatan Ulujami	93,33%	4 Laporan	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	3.000.000
<b>07.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>35.988.000</b>					<b>36.000.000</b>
<b>07.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>30.988.000</b>					<b>31.000.000</b>
07.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Ulujami	100%	1 Dokumen	100%	28.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100%	29.000.000
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Ulujami	100%	4 Laporan	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100%	2.000.000
<b>07.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>
07.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Persentase masyarakat desa dan	Jumlah peserta musyawarah perencanaan	Persentase kehadiran musyawarah	Kecamatan Ulujami	100%	18 Lembaga Kemasyarakatan	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-		Persentase masyarakat desa dan	100%	5.000.000

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kelurahan yang aktif	pembangunan	pembangunan (Desa/Kel+Kec)						Dana Alokasi Umum		kelurahan yang aktif		
<b>07.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>6.000.000</b>					<b>6.000.000</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Jenis laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang tersusun	Kecamatan Ulujami	100%	1 Laporan	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	5.000.000
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>								<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	Kecamatan Ulujami	100%	2 Laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	1.000.000
<b>07.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>53.658.000</b>					<b>53.658.000</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>53.658.000</b>					<b>53.658.000</b>
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Persentase potensi	Jumlah Orang yang Mengikuti	Persentase masyarakat yang	Kecamatan Ulujami	100%	228 orang	100%	47.158.000	Dana Transfer		Persentase potensi	100%	47.158.000

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional						Umum-Dana Alokasi Umum		konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Ulujami	100%	18 orang	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	1.000.000
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Ulujami	100%	1 laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	1.000.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Ulujami	100%	1 Dokumen	100%	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	4.500.000
<b>07.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>31.000.000</b>					<b>31.000.000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>31.000.000</b>					<b>31.000.000</b>
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan	Persentase	Jumlah Dokumen	Persentase desa	Kecamatan	86,67%	18	100%	1.000.000	Dana		Persentase	86,67	1.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	desa bertata kelola pemerintahan baik	yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Ulujami		Dokumen			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		desa bertata kelola pemerintahan baik	%	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Ulujami	86,67%	18 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	86,67 %	3.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Ulujami	86,67%	18 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	86,67 %	3.000.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Ulujami	86,67%	18 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	86,67 %	3.000.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Ulujami	86,67%	10 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	86,67 %	3.000.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Ulujami	86,67%	1 Dokumen	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	86,67 %	5.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Ulujami	86,67%	1 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	86,67 %	3.000.000,00
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan	Persentase	Jumlah Dokumen	Persentase desa	Kecamatan	86,67%	1 Dokumen	100%	5.000.000	Dana		Persentase	86,67	5.000.000,00



Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Perencanaan Pembangunan Partisipatif	desa bertata kelola pemerintahan baik	Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Ulujami					Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		desa bertata kelola pemerintah an baik	%	
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Ulujami	86,67%	1 Dokumen	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintah an baik	86,67 %	5.000.000,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Ulujami merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024.
2. Renja Kecamatan Ulujami memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

#### **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Ulujami secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

#### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Ulujami Tahun 2024 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Tahun 2024 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja

Kabupaten Pematang Tahun 2024 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Tahun 2024 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2024.

# LAMPIRAN

1. SK TIM
2. TABEL PERSANDINGAN



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050/ **351** /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2024

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 65 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA ; Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;



b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal **31 Mei 2023**

Pt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,  
  
MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050/351 /TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN ULUJAMI  
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Ulujami	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Ulujami	Ketua	
3.	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Ulujami	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
9.	Pelaksana Pada Kecamatan Ulujami	Anggota	SUMINEM, S.IP.
10.	Pelaksana Pada kecamatan Ulujami	Anggota	EKO HADI PURNOMO
11.	Pelaksana Pada kecamatan Ulujami	Anggota	Y. RETNONINGSIH

PI. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,  
  
MANSUR HIDAYAT





Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan Indikator lama	Target Lama								Batas Berekas	Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI)	Indikator (Pemutakhiran SIPD-RI)	Satuan Indikator Baru	Target Baru						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir	2021						2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan	Orang/ kegiatan	0	0	150	150	150	150	150	900	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	150	150	150	150	150	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	8	8	8	8	8	8	8	48		Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100		Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis/ bulan	1 paket	10 / 12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	60/72	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	10 / 12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	1 paket		4	4	4	4	4	24	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket		4	4	4	4	4	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis/ bulan	1 paket	4	4	4	4	4	4	24	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 paket	4	4	4	4	4	4	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis/ bulan	1 paket	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	18/72	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	
7.01.01.2.06.05	PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Jenis/ bulan	1 paket	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	12/72	7.01.01.2.06.05	PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 paket	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	
		Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	1 paket	10000	10000	10000	10000	10000	10000	60.000						1 paket	10000	10000	10000	10000	10000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan	Jenis surat kabar yang disediakan	Jenis/ bulan	1 paket	5	5	5	5	5	5	30	7.01.01.2.06.06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 paket	5	5	5	5	5	5	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	5	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	Jenis	0	0	1	1	1	1	1	5	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	13	71	91	91	91	91	91	526		Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Unit	13	71	91	91	91	91	91	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100		Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang tersedia	Unit	0	1	0	0	0	0	0	1	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1	0	0	0	0	0	









Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan Indikator lama	Target Lama							Target Akhir	Jumlah Kegiatan	Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI)	Indikator (Pemutakhiran SIPD-RI)	Satuan Indikator Baru	Target Baru						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021							2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir	
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan	Kewenangan	3	3	3	3	3	3	3	18		Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100		Hasil Kegiatan	Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.01.0 2.2.04. 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	Izin	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	15.840.	7.01.0 2.2.04. 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	
7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	Dokumen	18	18	18	18	18	18	18	108	7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	18	18	18	18	18	18	18	
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	Surat	2542	2542	2542	2542	2542	2542	2542	14.712					2542	2542	2542	2542	2542	2542	2542	
7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	66,25	66,25	78,33	78,33	80,83	80,83	83,33	80,83	7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	66,25	66,25	78,33	78,33	80,83	80,83	83,33	
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										45.000.000	7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan	Orang	Orang	1						780		Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	Dokumen	Orang	1						
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran musyawarah pembangunan (Desa/Kel+Kec)	%	%	130	-	-	-	-	-	552		Hasil Kegiatan	Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	%	%	130	-	-	-	-	-	
7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Orang	92	1	1	1	1	1	1	6	7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	92	1	1	1	1	1	1	
7.01.0 3.2.01. 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orang	1	1	1	1	1	1	1	6	7.01.0 3.2.01. 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbangkab yang didampingi	Desa/ kelurahan	1	1	1	1	1	1	1		7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	
7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	Lembaga	3	3	3	3	3	3	3	15		Keluaran Kegiatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	Lembaga kemasyarakatan	3	3	3	3	3	3	3	
	Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100		Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.01.0 3.2.03. 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	5	7.01.0 3.2.03. 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Lembaga kemasyarakatan	1	1	1	1	1	1	1	



Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan Indikator lama	Target Lama								Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI)	Indikator (Pemutakhiran SIPD-RI)	Satuan Indikator Baru	Target Baru						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir	2021					2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir	
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100		Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	12	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	2	2	2	2	2	2	2
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	Orang	1	1	1	1	1	1	1	5	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	1	1	1	1	1	1	1
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	Kasus	60	60	60	60	60	60	60	300	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	60	60	60	60	60	60	60
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompincam	Tema	2	2	2	2	2	2	2	12	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	61,11	61,11	66,67	66,67	72,22	72,22	77,78	77,78	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	61,11	61,11	66,67	66,67	72,22	72,22	77,78
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa	18	18	18	18	18	18	18	108		Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Dokumen	18	18	18	18	18	18	18
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100		Hasil Kegiatan	Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Desa/ kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	20	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Desa/ kegiatan	54	54	54	54	54	54	54	324	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	54	54	54	54	54	54	54
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	Desa/ kegiatan	54	54	54	54	54	54	54	324	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	54	54	54	54	54	54	54





**BERITA ACARA  
HASIL RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN ULUJAMI  
KECAMATAN ULUJAMI  
TAHUN 2023**

Pada hari Kamis tanggal Satu bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pendopo Kecamatan Ulujami telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh Camat, Danramil Ulujami, Kapolsek Ulujami, Kepala Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan Ulujami dan Kepala Desa se Kecamatan Ulujami sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum pada berita acara ini :

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan;

1. Sambutan - sambutan yang disampaikan oleh Camat, Danramil Ulujami, Kapolsek Ulujami pada acara pembukaan Koordinasi Tingkat Kecamatan.
2. Pemaparan Materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang disampaikan).

Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Koordinasi Tingkat Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan, maka pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Juni 2023

jam : 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Pendopo Kecamatan Ulujami

Koordinasi Tingkat Kecamatan Ulujami:

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, sasaran, yang disertai target dan keamaan serta sinergitas yang ada di Kecamatan Ulujami.
- KEDUA** : Hasil kesepakatan Koordinasi Tingkat Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan daftar hadir peserta Koordinasi Tingkat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024.


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Camat Ulujami



Drs. JOKO SUPRISNO, M.Si.  
NIP. 19661008-198603 1 002

Ulujami, 1 Juni 2023  
Notulen Rapat  
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

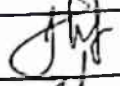

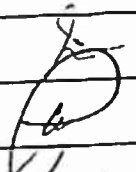
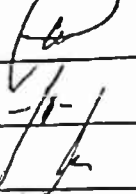
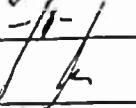
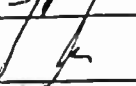
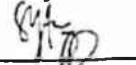



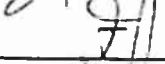




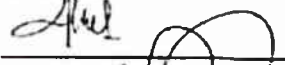

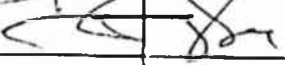


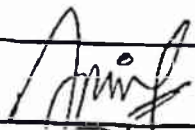



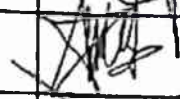




BEKTI RAHAYU, S.Pd.  
NIP. 19650603W8703 1 010



## DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : KAMIS, 1 JUNI 2023  
 JAM : 08.30 WIB – selesai  
 TEMPAT : PENDOPO KECAMATAN ULUJAMI  
 ACARA : RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN

NO	DINAS	NAMA	TTD
1	KAPOLSEK ULUJAMI	Tegeh H	
2	DANRAMIL ULUJAMI	Pai H	
3	KUA ULUJAMI		
4	KWK ULUJAMI		
5	Ka. PUSKESMAS ROWOSARI	SANTOSO	
6	Ka. PUSKESMAS MOJO	Kayam	
7	KA. SMA ULUJAMI	ans	
8	Ka. SMP N 1 ULUJAMI	Karyanto	
9	Ka. SMP N 2 ULUJAMI	Dwi spt	
10	Ka. SMP N 3 ULUJAMI	Sulpani	
11	Ka. SMP N 4 ULUJAMI	Rifai	
✓12	Kordinator. UPP & KB ULUJAMI		✓
✓13	Kordinator. PPL ULUJAMI		✓
✓14	Kordinator TPK ULUJAMI		✓
15	Kepala Desa SUKOREJO	Annisa H.A.	
16	Kepala Desa BOTEKAN	Tanjung	
17	Kepala Desa ROWOSARI	M. Ayo Rechi	
18	Kepala Desa AMBOWETAN	MARGONO	
19	Kepala Desa PAGERGUNUNG	Rasa	
20	Kepala Desa WIYOROWETAN	KAMADHONI	
21	Kepala Desa SAMONG	Penjo	
22	Kepala Desa TASIKREJO	Riyanto	
23	Kepala Desa KALIPRAU	RASNOTO	

24	Kepala Desa BUMIREJO	Kawir PererenComan	
25	Kepala Desa PAMUTIH	Kades	
26	Kepala Desa PADEK	KABR K.	
27	Kepala Desa KERTOSARI	Kawir Umum	
28	Kepala Desa BLENDUNG	Kasub	
29	Kepala Desa KETAPANG	Asis	
30	Kepala Desa LIMBANGAN	Kawir Umum (Anggun)	
31	Kepala Desa MOJO	Kasi Desa	
32	Kepala Desa PESANTREN	Kasi Pesra.	


 20 Juni 2023  
 CAMAT ULU-PAITAN  
 KECAMATAN  
 ULU-PAITAN  
 Drs. JOKO SUTRISNO, M.Si  
 Kepala Pembina Tk.I  
 NIP. 19661008 198603 1 002



Formulir E.70  
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
 Perangkat Daerah  
 Kabupaten/kota : Pematang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

2023


  
 Drs. **JOKO SUTRISNO, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19661008 198603 1 002